



Pemerintah Kota Samarinda

RENJA

BKPSDM 2026

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SAMARINDA**



Rencana Kerja

Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
Kota Samarinda



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2026, dan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 47);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah kota Samarinda Tahun 2024 Nomor: 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dijadikan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (2) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V Penutup.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 terdiri dari Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;

- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
 - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
 - q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
 - r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
 - s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
 - t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
 - u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
 - v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
 - w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
 - x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
 - y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
 - z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
 - aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
 - bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
 - cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
 - dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
 - ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
 - gg. Kecamatan Palaran;
 - hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
 - ii. Kecamatan Samarinda Kota;
 - jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
 - kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
 - ll. Kecamatan Samarinda Utara;
 - mm. Kecamatan Sambutan; dan
 - nn. Kecamatan Sungai Pinang.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah sesuai dengan:
- a. Sistematika dan Substansi Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029; dan
 - c. Hasil rangkaian penyusunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 5

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Agustus 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SAMARINDA**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SAMARINDA
NOMOR: 800 / 4965.a / 300.04/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SAMARINDA**

- Menimbang:**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.
- Mengingat:**
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
 9. Peraturan Walikota No 119 tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi ,serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;;

- Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:** Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.
- KESATU:** Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2025-2029.
- KETIGA:** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Samarinda
Pada Tanggal : 28 April 2025

Plt. Kepala BKPSDM Kota Samarinda



Drs. Samlian Noor, M.Si
NIP. 19690404 199003 1010

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Samarinda
Nomor : 800 / 4965.a / 300.04 / 2025
Tanggal : 28 April 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.
- Tugas** : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia..
- Fungsi** :
- ❖ Penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - ❖ Perumusan kebijakan dan penetapan rencana program dan kegiatan Badan;
 - ❖ Penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi kepegawaian;
 - ❖ Penyelenggaraan penilaian kinerja aparatur, pembinaan, penghargaan, dan kesejahteraan pegawai;
 - ❖ Penyelenggaraan mutasi, promosi, pengembangan karier dan pengembangan kompetensi aparatur;
 - ❖ Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan profesi Aparatur Sipil Negara;
 - ❖ Pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan kegiatan; dan
 - ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PERIODE PENGUKURAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Profesionalitas ASN	IP ASN	Indek	Per Tahun	Berdasarkan Aspek Perhitungan IP ASN pada Peraturan BKN-RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN	Sistem Informasi ASN-BKN	BKPSDM
2	Meningkatkan Pengetahuan, Keahlian dan Keterampilan ASN						

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda tahun 2026 merupakan pedoman perencanaan tahun kelima dari Rencana Strategis 2021 - 2026 yang memuat rencana, tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai yang disesuaikan dengan rancangan akhir RKPD 2026.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 terjadi peningkatan kinerja dalam setiap target dan realisasi sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021 – 2026. Pada tahun 2026, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, serta Penutup.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.

Samarinda , 11 September 2025

Plt. KEPALA BADAN



Drs. SAMLIAN NOOR.M, Si

NIP. 196904041990031010

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II Hasil Evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Lalu	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	42
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	55
BAB III Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	61
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SUMber Daya Manusia	65
3.3 Program dan Kegiatan	67
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SUMber Daya Manusia	99
BAB V PENUTUP	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya manusia oleh Pemerintah Daerah semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dalam perjalanannya dan tuntutan zaman telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menandai terjadinya perubahan manajemen pengelolaan sumber daya manusia dari sentralisasi menjadi desentralisasi, yang berimplikasi semakin mandirinya peranan Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya manusia.

Agar terwujudnya pemerintahan yang baik, maka dilaksanakan pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepegawaian.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, fungsi perencanaan sangat diperlukan sebagai sebuah peta yang berisikan apa yang akan dikerjakan meliputi : bagaimana mengerjakannya, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan; serta menjelaskan tujuan, strategi, sasaran, dan target yang dapat diukur secara sistematis.

Permendagri yang mengatur Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda sesuai ketentuan Undang-Undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) PD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2021- 2026 PD dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja PD menerjemahkan dan

mengoperasionalkan Renja Pemerintah Daerah ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program perangkat daerah secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra PD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka di bidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali, diantaranya adalah diwujudkannya tata pemerintahan yang demokratis (*democratic and good governance*). Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan aparatur negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional, dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan SDM dan profesionalisme pada Aparatur Negara terus dikembangkan guna mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaan program serta kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- g. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85)
- m. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - t. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
 - u. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021);
 - v. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- w. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- x. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
- y. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
- z. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2026, sedangkan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, proses penyusunan Renja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, keterkaitan antara Renja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan dokumen RKPD, Renstra Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan Renja K/L dan Renja PD Provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2.Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.3.Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.4.Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun-tahun sebelumnya

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

ada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang disesuaikan menurut Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs
4. (Sustainable Development Goals);
5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
4. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Visi dan Misi adalah Visi dan Misi RPJMD, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3.3.Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai :

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan
2. Lokasi program/kegiatan
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
4. Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Evaluasi kinerja merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa mendatang. Sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja yang berkaitan terhadap tujuan dan sasaran. Evaluasi terhadap kegiatan Instansi adalah bentuk paling kecil dari evaluasi kinerja organisasi. Seluruh atau sebagian kegiatan dapat dievaluasi menurut prioritas manajemen instansi. Tingkat pentingnya evaluasi sangat ditentukan oleh pentingnya kegiatan itu sendiri. Jika kegiatan itu merupakan kegiatan pokok atau kegiatan utama yang merupakan ciri organisasi Instansi dalam pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan yang cukup dominan dalam rangka menjalankan tugas pokok Instansi, dapat dikatakan bahwa kegiatan itu penting. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM dalam Pencapaian Renstra BKPSDM tahun 2024 adalah berisi 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, 60 (enam puluh) sub kegiatan.

Realisasi belanja pada tahun 2024 dan pelaksanaan efisien anggaran pada tabel dibawah ini :

N O	Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Realisasi keuangan	Persentase Keuangan	Efisiensi Anggaran	Pelaksanaan efisiensi anggaran
A	5.03.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	15.050.266.521	14.558.389.656	13.777.865.609	95	780.524.047	
I	5.03.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	218.884.609,00	88	31.115.391	
1	5.03.01.2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.000.000,00	125.000.000,00	104.395.585,00	84	20.604.415	Tidak melaksanakan perjalanan dinas , karena tidak memerlukan koordinasi keluar kota . Pemakaian anggaran perjalanan dinas hanya dibatasi pada menghadiri undangan atau pelatihan yang berhubungan program dan perencanaan
2	5.03.01.2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000,00	75.000.000,00	70.787.039,00	94	Rp 4.212.961	Efisiensi pada belanja makan minum , dengan mengurangi rapat internal . Diganti dengan dialog melalui grup sosmed
3	5.03.01.2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	43.701.985,00	87	Rp 6.298.015	Tidak melaksanakan perjalanan dinas , karena tidak memerlukan koordinasi keluar kota . Pemakaian anggaran perjalanan dinas hanya dibatasi pada menghadiri undangan atau pelatihan yang berhubungan program dan perencanaan
II	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.686.479.000,0 0	12.239.415.135,0 0	11.812.406.293,0 0	97	427.008.842,00	

1	5.03.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.535.903.000,00	11.171.242.916,00	10.802.985.965,00	97	Rp 368.256.951	
1	5.03.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.100.576.000,00	1.018.172.219,00	962.763.684,00	95	Rp 55.408.535	
2	5.03.01.2.02.003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	46.656.644,00	93	Rp 3.343.356	
III	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.094.654.621,00	1.199.654.621,00	1.114.172.307,00	93	264.501.256,00	
1	5.03.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.326.700,00	30.326.700,00	11.809.700,00	39	132.250.628,00	Melaksanakan belanja sesuai dengan kebutuhan komponen listrik yang memerlukan perbaikan / penggantian
2	5.03.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	319.232.500,00	319.232.500,00	318.392.500,00	100	66.125.314,00	Sisa pagu adalah hasil dari selisih pagu dan harga nego dengan pihak penyedia
3	5.03.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.689.000,00	10.689.000,00	8.835.000,00	83	Rp 1.854.000,00	Sisa pagu adalah hasil dari selisih pagu dan harga nego dengan pihak penyedia
4	5.03.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.818.421,00	42.818.421,00	41.685.400,00	97	Rp 1.133.021,00	Sisa pagu adalah hasil dari selisih pagu dan harga nego dengan pihak penyedia
5	5.03.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	8.746.000,00	73	Rp 3.254.000,00	Pembelanjaan menyesuaikan dengan kebutuhan
6	5.03.01.2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	679.588.000,00	784.588.000,00	724.703.707,00	92	Rp 59.884.293,00	Pembelanjaan menyesuaikan dengan kebutuhan
IV	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94.000.000,00	-	-		-	

1	5.03.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	94.000.000,00	-				
V	5.03.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	258.918.000,00	220.625.000,00	212.382.400,00	96	8.242.600,00	
1	5.03.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.133.000,00	83.320.000,00	75.407.400,00	91	Rp 7.912.600	Pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan perbulan
2	5.03.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.785.000,00	137.305.000,00	136.975.000,00	100	Rp 330.000	
VI	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.214.900,00	648.694.900,00	420.020.000,00	65	228.674.900,00	
1	5.03.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	254.994.500,00	254.994.500,00	182.545.000,00	72	Rp 72.449.500	
2	5.03.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.570.000,00	183.050.000,00	65.740.000,00	36	Rp 117.310.000	
3	5.03.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	Rp 25.000.000	
4	5.03.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	153.170.400,00	153.170.400,00	141.250.000,00	92	Rp 11.920.400	

		Kantor dan Bangunan Lainnya						
5	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.480.000,00	32.480.000,00	30.485.000,00	94	Rp 1.995.000	
B	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	14.110.534.200,00	13.739.718.863,00	10.840.992.537,00	79	2.898.726.326,00	
VI	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3.157.106.475,00	2.760.666.888,00	1.991.136.871,00	72	769.530.017,00	
1	5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	153.500.000,00	-	-			
2	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	45.750.000,00	-	-			
3	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.224.547.475,00	1.172.057.888,00	778.118.265,00	66	Rp 393.939.623	
4	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	32.400.000,00	-	-			
5	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	130.409.000,00	130.409.000,00	123.047.608,00	94	Rp 7.361.392	

6	5.03.02.2.01.008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1.123.000.000,00	1.010.700.000,00	699.694.577,00	69	Rp 311.005.423	
7	5.03.02.2.01.009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	71.500.000,00	71.500.000,00	49.164.756,00	69	Rp 22.335.244	Waktu Pelaksanaan kegiatan dapat dipersingkat(makan-minum), kegiatan rapat bisa dihadiri via zoom(perjadin)
8	5.03.02.2.01.010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	153.000.000,00	153.000.000,00	143.676.846,00	94	Rp 9.323.154	Belanja Modal tidak terealisasi (Printer)
9	5.03.02.2.01.011	Pengelolaan Data Kepegawaian	120.000.000,00	120.000.000,00	109.589.819,00	91	Rp 10.410.181	Kegiatan ada pilihan Via zoom
10	5.03.02.2.01.012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	103.000.000,00	103.000.000,00	87.845.000,00	85	Rp 15.155.000	Kegiatan ada pilihan Via zoom
VI I	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	2.273.795.050,00	1.936.295.050,00	1.647.973.882,00	85	288.321.168,00	
1	5.03.02.2.02.001	Pengelolaan Mutasi ASN	324.809.050,00	324.809.050,00	206.880.893,00	64	Rp 117.928.157	
2	5.03.02.2.02.002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	625.986.000,00	420.786.000,00	362.924.113,00	86	Rp 57.861.887	
3	5.03.02.2.02.003	Pengelolaan Promosi ASN	1.323.000.000,00	1.190.700.000,00	1.078.168.876,00	91	Rp 112.531.124	
VI II	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	6.695.662.750,00	7.252.107.000,00	5.550.559.423,00	77	1.701.547.577,00	
1	5.03.02.2.02.002	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	1.082.749.000,00	1.403.351.000,00	1.345.273.350,00	96	Rp 58.077.650	Sisa anggaran belanja perjalanan dinas
2	5.03.02.2.02.003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	184.868.000,00	184.868.000,00	100.034.000,00	54	Rp 84.834.000	Karena beberapa kegiatan di adakan di hotel, sehingga anggaran makan minum tidak terserap.

3	5.03.02.2.02.004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	715.000.000,00	1.439.879.500,00	1.313.014.700,00	91	Rp 126.864.800	Alokasi Beasiswa Selama Satu Tahun dan di bayarkan hanya 6 bulan
4	5.03.02.2.02.005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.024.380.750,00	1.934.380.750,00	1.360.605.548,00	70	Rp 573.775.202	Kurangnya peserta aktif untuk mendaftarkan diri nya untuk mengikuti diklat dan peserta yang ikut diklat terkadang menggunakan anggaran perjalanan dinas masing- masing OPD.
5	5.03.02.2.02.008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	2.156.915.000,00	1.833.377.750,00	1.092.261.251,00	60	Rp 741.116.499	Kurangnya peserta aktif untuk mendaftarkan diri nya untuk mengikuti diklat dan peserta yang ikut diklat terkadang menggunakan anggaran perjalanan dinas masing- masing OPD.
6	5.03.02.2.02.009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	64.890.000,00	64.890.000,00	56.750.000,00	87	Rp 8.140.000	
7	5.03.02.2.02.012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	153.000.000,00	153.000.000,00	114.881.710,00	75	Rp 38.118.290	Narasumber Menggunakan Tenaga Pemkot dan Honorariumnya di bayarkan 50 % dari pagu
8	5.03.02.2.02.013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	74.590.000,00	74.590.000,00	50.200.682,00	67	Rp 24.389.318	Belanja makan minum terdapat silva , karena kegiatan sosialisasi bekerjasama dengan BKD Propinsi Kaltim
9	5.03.02.2.02.014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	163.770.000,00	163.770.000,00	117.538.182,00	72	Rp 46.231.818	Narasumber Menggunakan Tenaga Pemkot dan Honorariumnya di bayarkan 50 % dari pagu
10	5.03.02.2.02.015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	75.500.000,00	-	-			

IX	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.983.969.925,00	1.790.649.925,00	1.651.322.361,00	92	139.327.564,00	
1	5.03.02.2.04.002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	251.227.225,00	251.227.225,00	217.619.351,00	87	Rp 33.607.874	Pembayaran lisensi dan perjalanann dinas (pagu anggaran lebih tinggi dari harga/biaya yg di bayarkan)
2	5.03.02.2.04.004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	938.089.910,00	94	Rp 61.910.090	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dimana untuk Ketua, Wakil Ketua & Sekretaris sudah masuk kedalam Honor Tim Penilai Penghargaan sehingga tidak bisa kami SPJ kan kembali,sisa dari Honorarium Narasumber, Perjalanan Dinas
3	5.03.02.2.04.005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	103.000.000,00	103.000.000,00	101.845.512,00	99	Rp 1.154.488	Sisa dari Belanja Paket Meeting Dalam Kota dan Belanja Pengiriman
4	5.03.02.2.04.006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	94.606.350,00	94.606.350,00	93.749.350,00	99	Rp 857.000	Cetak Buku Laporan
5	5.03.02.2.04.007	Pembinaan Disiplin ASN	153.000.000,00	98.640.000,00	85.434.800,00	87	Rp 13.205.200	ATK tersisa pembelian Seminar Kit karena menyesuaikan kebutuhan peserta Bimtek, Cetak Spanduk tidak terpakai karena menyesuaikan ruangan yg digunakan, Honorarium dan Biaya Perjalanan Dinas bagi Narasumber menyesuaikan kesediaan Narasumber yang hadir.
6	5.03.02.2.04.008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	154.500.000,00	55.250.000,00	41.623.363,00	75	Rp 13.626.637	Biaya Perjalanan Dinas tidak terpakai karena menyesuaikan pelaksanaan tugas, Honorarium Tim tidak mendapat persetujuan untuk digunakan karena terkait tupoksi.

7	5.03.02.2.04.009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	84.636.350,00	84.636.350,00	79.240.614,00	94	Rp 5.395.736	ATK tersisa karena kebutuhan yang tersedia sudah mencukupi.
8	5.03.02.2.04.010	Evaluasi Disiplin ASN	143.000.000,00	103.290.000,00	93.719.461,00	91	Rp 9.570.539	Cetak Buku Laporan tidak perlu melalui cetak/penjilidan, Honorarium Panitia tersisa karena menyesuaikan jumlah anggota panitia sesuai ketentuan yang berlaku, Biaya Perjalan Dinas tersisa karena menyesuaikan pelaksanaan tugas.
C	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.127.252.700,00	6.043.826.200,00	4.917.998.803,00	77,00	1.125.827.397,00	
X	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.349.992.700,00	1.510.863.200,00	1.366.893.854,00	90,00	143.969.346,00	
1	5.04.02.2.01.001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	254.590.000,00	415.460.500,00	347.562.554,00	84	Rp 67.897.946	Narasumber Menggunakan Tenaga Pemkot dan Honorariumnya di bayarkan 50 % dari pagu

2	5.04.02.2.01.003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	886.130.000,00	886.130.000,00	844.662.076,00	95	Rp 41.467.924	Sisa pagu adalah belanja Perjalanan dinas dikarenakan ada edaran dari wali kota
3	5.04.02.2.01.004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	209.272.700,00	209.272.700,00	174.669.224,00	83	Rp 34.603.476	Narasumber Menggunakan Tenaga Pemkot dan Honorariumnya di bayarkan 50 %
XI	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan	4.777.260.000,00	4.532.963.000,00	3.551.104.949,00	78	981.858.051,00	

		Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
1	5.04.02.2.02.001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	135.110.000,00	119.798.000,00	110.613.681,00	92	Rp 9.184.319	Narasumber Menggunakan Tenaga Pemkot dan Honorariumnya di bayarkan 50 %
2	5.04.02.2.02.003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	96.616.000,00	97	Rp 3.384.000	Sewa Gedung yang di gunakan hanya 3 hari
3	5.04.02.2.02.004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	200.000.000,00	200.000.000,00	104.665.000,00	52	Rp 95.335.000	Pembayaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan
4	5.04.02.2.02.005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	135.300.000,00	135.300.000,00	70.474.748,00	52	Rp 64.825.252	Pembayaran lebih kecil dari pagu yang terdapat dalam SSH

5	5.04.02.2.02.007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4.056.850.000,00	3.827.865.000,00	3.096.261.590,00	81	Rp 731.603.410	Biaya kontribusi sesuai dengan jumlah kuota peserta yang dikirimkan
6	5.04.02.2.02.008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	150.000.000,00	150.000.000,00	72.473.930,00	48	Rp 77.526.070	Narasumber Menggunakan Tenaga Pemkot dan Honorariumnya di bayarkan 50 % dari pagu
			35.288.053.421,00	34.341.934.719,00	29.536.856.949,00	86	4.805.077.770,00	

Perhitungan indikator kinerja menggunakan pembandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, serta kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, serta kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya. Dari hasil laporan tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia s/d Tahun 2024
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n- 1) tahun berjalan 2025	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra s/d tahun berjalan 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2024	Tingkat Capaian Realisasi target (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
						3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	92	90	99,03	1,10		191,03	212,26%
						Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	70		60	67,5	1,13	71,50	139,00	198,57%
5	03	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	70	45,44	60	67,5	1,125		112,94	161,34%
						Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	100							

5	03	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	7	7	100,00%	7	21,00	300,00%
5	03	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	14	14	14	100,00%	14	42,00	300,00%
5	03	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	100,00%	4	12,00	300,00%
5	03	01	2	01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1						0,00	0,00%
5	03	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah			7	7				
							Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100							
5	03	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	67	71	79	89,87%	85	231,00	271,76%
5	03	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	20	26	27	96,30%	12	59,00	491,67%
5	03	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	5	5	12	41,67%	12	29,00	241,67%
5	03	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
							Persentase laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100							
5	03	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	104						0,00	0,00%

5	03	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20							0,00	0,00%
5	03	01	2	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20							0,00	0,00%
5	03	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1	1					
							Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100								
5	03	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4	4	100,00%	4	12,00	300,00%	
5	03	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	4	100,00%	4	12,00	300,00%	
5	03	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4					4	4,00	100,00%	
5	03	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	30	10	10	100,00%	10	50,00	500,00%	
5	03	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	1	6	6	100,00%	6	13,00	216,67%	
5	03	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1					1	1,00	100,00%	
5	03	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	3	10	10	100,00%	10	23,00	230,00%	
5	03	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	37	30	30	100,00%	15	82,00	546,67%	
5	03	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1		#DIV/0!				
							Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	100								

5	03	01	2	07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2							0,00	0,00%
5	03	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	28	5	5	100,00%	5		38,00	760,00%
5	03	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2					2		2,00	100,00%
5	03	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			1	1					
							Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100								
5	03	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28	1	37	37	100,00%	28		66,00	235,71%
5	03	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100,00%	12		36,00	300,00%
5	03	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1	1					
							Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100								
5	03	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	1	28	28	100,00%	28		57,00	203,57%
5	03	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	1	1	100,00%	1		3,00	300,00%
5	03	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2		2	2	100,00%	2		4,00	200,00%
5	03	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100,00%	1		3,00	300,00%

5	03	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	4	1	1	100,00%	1	6,00	600,00%
5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan Kepegawaian								
							Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100,00							
5	03	02	2	01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian ASN			92,11	92,11				
							Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100							
5	03	02	2	01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	1	1	1	100,00%	1	3,00	300,00%
5	03	02	2	01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	1	1	1	100,00%	1	3,00	300,00%
5	03	02	2	01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	2	4	4	100,00%	4	10,00	250,00%
5	03	02	2	01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3	700	1	3	33,33%	1	704,00	23466,67%
5	03	02	2	01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	59,95	1	1	100,00%	1	61,95	6195,00%
5	03	02	2	01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	2	1	1	100,00%	1	4,00	400,00%
5	03	02	2	02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Usulan Mutasi dan Promosi ASN			155	215	0,72			
							Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100							
5	03	02	2	02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2	2	2	2	100,00%	2	6,00	300,00%

5	03	02	2	02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700	864	1000	1000	100,00%	700	2564,00	366,29%
5	03	02	2	02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	2	2	2	100,00%	2	6,00	300,00%
5	03	02	2	03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi			500	626				
							Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100							
5	03	02	2	03	0002	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	2	20	2	2	100,00%	2	24,00	1200,00%
5	03	02	2	03	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2	20	2	2	100,00%	2	24,00	1200,00%
5	03	02	2	03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10	1	5	5	100,00%	10	16,00	160,00%
5	03	02	2	03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2	73,6	2	2	100,00%	2	77,60	3880,00%
5	03	02	2	03	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100	2	100	117	85,47%	100	219,00	219,00%
5	03	02	2	03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20	3	20	20	100,00%	20	43,00	215,00%
5	03	02	2	04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja aparatur			79,30	79,30	1,00			
							Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	95,00							
5	03	02	2	04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	15	2	2	100,00%	2	19,00	950,00%
5	03	02	2	04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700	21	700	21	3333,33%	700	742,00	106,00%
5	03	02	2	04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400	478	250	385	64,94%	400	1263,00	315,75%
5	03	02	2	04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	120	21	25	7	357,14%	120	148,00	123,33%
5	03	02	2	04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	100	1	1	100,00%	1	102,00	10200,00%

5	03	02	2	04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15	14	15	14	107,14%	15	43,00	286,67%
5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia								
							Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100,00							
5	04	02	2	01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Target ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi			358	358				
							Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100							
5	04	02	2	01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	2	1	1	100,00%	1	4,00	400,00%
5	04	02	2	01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200	139	200	830	24,10%	200	1169,00	584,50%
5	04	02	2	01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1	5	1	1	100,00%	1	7,00	700,00%
5	04	02	2	02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi, kelembagaan,			1177	1177				

							pengembangan manajerial dan fungsional										
							Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100									
5	04	02	2	02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2	2	2	2	100,00%	1	5,00	250,00%		
5	04	02	2	02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	1		1	1	100,00%	1	2,00	200,00%		
5	04	02	2	02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10		10	10	100,00%	10	20,00	200,00%		
5	04	02	2	02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2	2	2	2	100,00%	2	6,00	300,00%		
5	04	02	2	02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	5	5	5	100,00%	5	15,00	300,00%		
5	04	02	2	02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi,	1	1	1	1	100,00%	1	3,00	300,00%		

							Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama										
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Walikota No 8 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda, dalam hal ini tugas dari Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKPSDM Kota Samarinda memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indikator Kepala Daerah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	TARGET KINERJA		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	6	7	11	12	16	17
	IKU						
1	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepegawaian sesuai dengan jenis Jabatan						
2	Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit						
3	Persentase penurunan indisiplinair ASN						
4	Persentase Aparatur Sesuai Dengan Standart Kompetensi Jabatan.	500	5000	1675	4470	335	89,4
	IKK						
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						

2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
3	Program Kepegawaian Daerah	15	100	15	100	100	100
4	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	46,63	43,8	46,63	47	100,00	107,31
	NSPK						
1	Nilai NSPK	72		78,25		108,68	
	SPM						
2	Nilai IKM	90	90	94,05	99,03	104,5	110,03

Capaian kinerja pelayanan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 untuk tahun n-2, n-1, tahun n dan tahun n+1 *Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel – C.30.*

TABEL T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

No.	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
	1	2	3	6	7	8	8	10	11	12	13	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			90	90	90	90	99,03	99,03	99,03	99,03	
	Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah			95	90	90	90			90	90	
2	Nilai AKIP			60	60	60	60	67,5	67,5	67,5	67,5	
	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP			100	100	100	100			100	100	
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7	7	7	7	7	7	7	7	
4	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			14	14	14	14	14	14	14	14	
5	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4	4	4	4	4	4	4	4	
6	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1	1	1		1	1	1	
7	Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu			100	100	100	100			100	100	
8	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			67	67	67	67	79	79	79	79	
9	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			20	20	20	20	27	27	27	27	

10	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5	5	5	5	12	12	12	12	
11	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3	3	3	3					
	Persentase laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu			100	100	100	100			100	100	
12	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			94	94	94	94					
13	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20	20	20	20					
14	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			20	20	20	20					
15	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi			100	100	100	100			100	100	
16	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4	4	4	4	4	4	4	4	
17	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4	4	4	4	4	4	4	4	
18	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4	4	4	4					
19	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			10	10	10	10	10	10	10	10	
20	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6	6	6	6	6	6	6	6	
21	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1	1	1	1					
22	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			10	10	10	10	10	10	10	10	

23	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			30	30	30	30	30	30	30	30	
24	Jumlah laporan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang			100	100	100	100			100	100	
25	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1	1	1	1					
26	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			5	5	5	5	5	5	5	5	
27	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2	2	2	2					
28	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			1	1	1	1					
29	Jumlah Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			2	2	2	2	1	1	1	1	
	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP			100	100	100	100			100	100	
30	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1	1	1	1	37	37	37	37	
31	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			37	37	37	37	12	12	12	12	
32	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4	4	4	4	1	1	1	1	
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik			100	100	100	100			100	100	
33	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12	12	12	12	28	28	28	28	
34	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1	1	1	1	1	1	1	1	

35	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			28	28	28	28	2	2	2	2	
36	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	1	1	1	1	1	1	1	
37	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2	2	2	2	1	1	1	1	
38	Persentase Pelayanan Kepegawaian			100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi											
39	Persentase Pengadaan, Pemberhentian ASN			8	8	8	8	87,5	87,5	87,5	87,5	
	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi			100	100	100	100			100	100	
40	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN			1	1	1	1	1	1	1	1	
41	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			1	1	1	1	1	1	1	1	
42	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			100,00	100,00	39,88	39,88	1	1	1	1	
43	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN			87,5	87,5	87,5	87,5	1	1	1	1	
44	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			1	1	1	1	4	4	4	4	
45	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			1	1	1	1	3	3	3	3	
46	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN			1	1	1	1	1	1	1	1	
47	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			1	1	1	1	1	1	1	1	
48	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian			4	4	4	4	1	1	1	1	

49	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			1	1	1	1	1	1	1	1	
50	Jumlah Usulan Mutasi dan Promosi ASN			1	1	1	1	67	67	67	67	
	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya			100	100	100	100			100	100	
51	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			1	1	1	1	2	2	2	2	
52	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			1	1	1	1	1000	1000	1000	1000	
53	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			150	150	150	150	2	2	2	2	
54	Jumlah ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi			2	2	2	2	1285	1285	1285	1285	
	Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya			100	100	100	100			100	100	
55	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>			700	700	700	700	2	2	2	2	
56	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			2	2	2	2	2	2	2	2	
57	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			500	500	500	500	5	5	5	5	
58	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			2	2	2	2	2	2	2	2	
59	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional			2	2	2	2	117	117	117	117	
60	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN			10	10	10	10	2	2	2	2	
61	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina			2	2	2	2	200	200	200	200	
62	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir			100	100	100	100	20	20	20	20	

63	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional			2	2	2	2	1	1	1	1	
64	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja aparatur			2	2	2	2	79,30	79,30	79,30	79,30	
	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik			79,3	95	95	96			95,00	96,00	
65	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			200	200	200	200	2	2	2	2	
66	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			20	20	20	20	21	21	21	21	
67	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			1	1	1	1	385	385	385	385	
68	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur			79,30	79,30	79,30	79,30	3	3	3	3	
69	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			2	2	2	2	7	7	7	7	
70	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			700	700	700	700	1	1	1	1	
71	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani			400	400	400	400	14	14	14	14	
72	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN			3	3	3	3	1	1	1	1	
73	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia			120	120	120	120	47,00	84,11	84,11	84,11	
	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis			100	100	100	100			100,00	100,00	
74	Jumlah Target ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi			1	1	1	1	200	200	200	200	
	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis			100	100	100	100			100	100	

75	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun			15	15	15	15	1	1	1	1	
76	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			1	1	1	1	830	830	830	830	
77	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			1	1	1	1	1	1	1	1	
78	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi , kelembagaan , pengembangan manajerial dan fungsional			45,62	45,62	45,62	45,62	996	996	996	996	
	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional			100,00	100,00	100,00	100,00			100	100	
79	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun			200	200	200	200	2	2	2	2	
80	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik			1	1	1	1	1	1	1	1	

81	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota			200	200	200	200	10	10	10	10	
82	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga			1	1	1	1	2	2	2	2	
83	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			420	420	420	420	5	5	5	5	
84	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama			2	2	2	2	1	1	1	1	
85	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik			1	1	1	1		1	1	1	
86	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota			10	10	10	10		10	10	10	
87	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar			1	1					1		
88	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga			2	2	2	2		2	2	2	
89	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			5	5	5	5		5	5	5	

90	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama			1	1	1	1		1	1	1	
----	---	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	--

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam tugas pembantuan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia , Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang merupakan salah satu instansi yang memberikan pelayanan bagi aparatur dalam sisi kebutuhan kepegawaian. Tema Pembangunan RKPD Tahun 2026 Yaitu “ Samarinda Maju Kaltim Maju “ , dimana dukungan BKPSDM dalam terciptanya tema pembangunan tersebut adalah menyediakan ASN yang berkualitas dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan baik peningkatan infrastruktur dan peningkatan perekonomian .

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2024 adalah masalah eksternal karena sebagian besar outcomes akhir produk kegiatan BKPSDM Kota Samarinda ada pada pihak ketiga , diantaranya yaitu Badan Kepegawaian Negara (Pusat dan Regional) , Kementerian PAN RB .

Pesatnya perkembangan sistem informasi menuntut BKPSDM Kota Samarinda untuk terus mengembangkan sistem , meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kinerja ASN untuk mencapai kualitas ASN yang baik.

Berdasarkan **identifikasi permasalahan** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM, maka dapat ditentukan **isu-isu penting** sebagai berikut :

- Percepatan Penerapan Manajemen Talenta berdasarkan sistem merit yang mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja mulai dari perencanaan ASN, pengembangan kompetensi ASN dan karier, hingga pada kompensasi.
- Pengembangan Kompetensi ASN yang terintegrasi (*Corporate University*) yang mengedepankan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap perilaku melalui pendekatan

pembelajaran yang kolaboratif, terbuka, dinamis dan saling terhubung satu dengan lainnya;

- Digitalisasi Layanan Kepegawaian;
- Penguatan Integritas dan Netralitas ASN sebagai upaya peningkatan pelayanan publik agar dapat berjalan dengan optimal sehingga mengarah pada perubahan sikap dan perilaku serta motivasi kerja untuk menciptakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktifitas yang diharapkan.;
- Penataan , penempatan dan promosi berdasarkan kompetensi
- Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai

Dari isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah tersebut diatas , maka selanjutnya menjadi dasar untuk membuat isu strategis masing – masing bidang , adalah :

a. Isu Strategis bidang Mutasi dan Promosi :

- 1) Perencanaan Mutasi Umum Pegawai yang tepat guna dan Konsisten dalam pelaksanaannya.
- 2) Kemampuan peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan pengembangan karir Pegawai dan Peningkatan kualitas pegawai didukung oleh aparatur yang handal dan sarana prasarana berdasarkan prinsip-prinsip good governance berdasarkan system merit

b. Isu Strategis bidang Pengembangan SDM:

- 1) Kemampuan meningkatkan kualitas pegawai secara profesional sesuai dengan kompetensi ASN dengan diklat , bimtek,workshop , sosialisasi dan tugas belajar

c. Isu Strategis bidang Pembinaan Aparatur:

- 1) Penguatan kerjasama lembaga baik horizontal maupun vertikal.
- 2) Mampu mewujudkan Pelayanan Kesejahteraan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
- 3) Kemampuan untuk meningkatkan Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

- d. Isu Strategis bidang Pengadaan dan Pemberhentian :
- 1) Pemantapan pengelolaan data dan informasi kepegawaian yang akurat
 - 2) Kemampuan mewujudkan pengadaan ASN berdasarkan perbandingan obyektif sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan.
 - 3) Kemampuan mewujudkan Satu Data ASN mendukung penyusunan kebijakan ASN berbasis data.

a. Peningkatan Pelaksanaan

Dalam menghadapi isu-isu strategis, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda menyusun pilihan strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Tabel 2.3.1
 Uraian Masalah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI				
“ Samarinda MAJU untuk KALTIM MAJU “				
NO	MISI	Permasalahan	Akar Masalah	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel	Masih belum meratanya distribusi pegawai dan penempatan jabatan yang sesuai kompetensi	Masih kurangnya pelaksanaan uji kompetensi untuk semua lini dan struktur jabatan	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja
			Terdapat PNS yang sudah pensiun yang tidak diisi/ digantikan oleh PNS dengan anjab sejenis	
			Penerimaan PPPK belum sesuai dengan kebutuhan organisasi	
			Kurangnya dukungan OPD untuk input penilaian kinerja pegawai di lingkungan masing-masing	
			Masih kurangnya intensitas pelaksanaan diklat teknis, struktural dan fungsional dalam pengelolaan pembangunan	

			Terbatasnya diklat yang diikuti setiap ASN	
		Kepatuhan terhadap Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Kepegawaian masih kategori sedang	Kurangnya komitmen bersama untuk mematuhi norma standar tersebut	

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tercantum pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Kepegawaian Daerah
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Perbandingan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan BKPSDM tidak jauh berbeda yang membedakan adalah outcome dan indikator program serta indikator kegiatan yang berubah mengikuti aturan Instruksi Menteri No 2 Tahun 2025 Tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025 s.d 2029 , selaras dengan tuntutan reformasi birokrasi untuk pembinaan dan pengembangan aparatur sebagaimana terlihat dalam *tabel T- C 31 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD terlampir*

Tabel T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)
	2		4	5	6	7		9	10	11
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Samarinda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	59.155.947.597.000	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Samarinda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	21.029.639.386
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Nilai AKIP	60	350.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Nilai AKIP	60	400.000.000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	200.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	75.000.000
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	75.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	50.000.000
6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	75.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	75.000.000

7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah	12	59.152.555.277.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah	12	17.957.142.236
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	58.100.533.058.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	14.209.911.236
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	1.051.972.219.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28	3.697.231.000
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	50.000.000
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	125.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	494.000.000
12	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	104	50.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94	94.000.000,00
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	25.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	100.000.000,00
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	50.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	300.000.000,00
15	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	550.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	852.500.000
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	15.000.000
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	250.000.000

18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	5.000.000
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	25.000.000
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	40.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	40.000.000
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	7.500.000
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	10.000.000
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	500.000.000
24	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Jumlah laporan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	615.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Jumlah laporan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	245.000.000
25	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	520.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	175.000.000,00
26	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	75.000.000	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	50.000.000
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	20.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	20.000.000,00
28	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1	Jumlah Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1	347.320.000	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1	Jumlah Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1	375.000.000
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28	83.320.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37	85.000.000

30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	264.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	290.000.000
31	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1.405.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	705.997.150
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	450.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	455.997.150,00
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	800.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	15.000.000,00
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	5.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	5.000.000,00
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	200.000.000,00
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	30.000.000,00
37	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Samarinda	Persentase Pelayanan Kepegawaian	100,00	9.300.500.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Samarinda	Persentase Pelayanan Kepegawaian	100,00	10.412.924.750
38	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Samarinda	Persentase Pengadaan, Pemberhentian ASN	11,96	1.075.000.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Samarinda	Persentase Pengadaan, Pemberhentian ASN	87,5	2.967.750.000

39	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	100.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	25.750.000
40	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Samarinda	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	600.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Samarinda	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	1.133.000.000
41	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	50.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	154.500.000
42	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Samarinda	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3	200.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Samarinda	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3	1.500.000.000
43	Pengelolaan Data Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	125.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	154.500.000
44	Mutasi dan Promosi ASN	Samarinda	Presentase ASN yang di mutasi dan dipromosikan	16,80	1.600.000.000	Mutasi dan Promosi ASN	Samarinda	Presentase ASN yang di mutasi dan dipromosikan	16,80	1.800.036.000
45	Pengelolaan Mutasi ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2	250.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2	154.500.000
46	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Samarinda	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700	500.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Samarinda	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700	645.536.000
47	Pengelolaan Promosi ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	850.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	1.000.000.000
48	Pengembangan Kompetensi ASN	Samarinda	Jumlah ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	1000	4.900.500.000	Pengembangan Kompetensi ASN	Samarinda	Jumlah ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	1000	4.030.138.750
49	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Samarinda	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	2	1.500.000.000	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Samarinda	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	2	564.749.000

50	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2	100.000.000	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2	184.868.000
51	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Samarinda	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10	300.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Samarinda	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10	500.000.000
52	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2	1.275.500.000	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2	1.523.606.750
53	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Samarinda	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100	1.400.000.000	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Samarinda	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100	1.156.915.000
54	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Samarinda	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20	325.000.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Samarinda	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20	100.000.000
55	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Samarinda	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja aparatur	100,00	1.725.000.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Samarinda	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja aparatur	100,00	1.615.000.000
56	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	400.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	180.250.000
57	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Samarinda	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700	930.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Samarinda	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700	1.000.000.000
58	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Samarinda	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400	150.000.000	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Samarinda	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400	103.000.000
59	Pembinaan Disiplin ASN	Samarinda	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	120	75.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	Samarinda	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	120	100.000.000
60	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	120.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	180.250.000
61	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Samarinda	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15	50.000.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Samarinda	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15	51.500.000

62	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Samarinda	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	15,08	6.375.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Samarinda	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	45,62	5.061.400.000
63	Pengembangan Kompetensi Teknis	Samarinda	Jumlah ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	200	2.100.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Samarinda	Jumlah ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	200	563.500.000
64	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Samarinda	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	150.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Samarinda	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	100.000.000
65	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Samarinda	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200	1.850.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Samarinda	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200	360.500.000

66	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1	100.000.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1	103.000.000
67	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Samarinda	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi , kelembagaan , pengembangan manajerial dan fungsional	1003	4.275.000.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Samarinda	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi , kelembagaan , pengembangan manajerial dan fungsional	1003	4.497.900.000
68	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Samarinda	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2	50.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Samarinda	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2	36.050.000
69	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	1	150.000.000	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	1	150.000.000

70	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10	200.000.000	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10	100.000.000
71	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2	100.000.000	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2	100.000.000
72	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	3.725.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	4.056.850.000
73	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1	50.000.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1	55.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh stakeholders BKPSDM Kota Samarinda . BKPSDM Kota Samarinda merupakan perangkat daerah penunjang sasaran Kota Samarinda belum melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dari masyarakat umum (khalayak ramai), karena kekhususan entitas ini berhubungan dengan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya pegawai dalam lingkup Pemerintah Kota Samarinda.

Namun demikian sesuai tugasnya untuk menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia , BKPSDM mempunyai kewajiban mendukung kebijakan Kepala Daerah dalam misi ke 5 : mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif , Responsif dan adaktif yang berintegritas dan akuntabel. Usulan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda disajikan dalam tabel C.32 berikut :

Tabel C.32 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

N O	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BESARAN/VOLUME
1	2	3	4		5
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Samarinda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Nilai AKIP	Nilai	60
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4
6	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	dokumen	1

7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	85
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	28
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3
12	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	94
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20
15	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	1
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4
18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30
24	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Jumlah laporan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1

25	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2
26	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2
28	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2
29	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1	Jumlah Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	1
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	37
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
32	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	28
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1
35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
38	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Samarinda	Persentase Pelayanan Kepegawaian	Persen	100,00
39	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Samarinda	Persentase Pengadaan, Pemberhentian ASN	Persentase	13,62
40	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen	1
41	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1
42	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Samarinda	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan	Dokumen	1

			Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		
43	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	1
44	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	4
45	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Samarinda	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	3
46	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen	1
47	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1
48	Pengelolaan Data Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1
49	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1
50	Mutasi dan Promosi ASN	Samarinda	Presentase ASN yang di mutasi dan dipromosikan	ASN	16,80
51	Pengelolaan Mutasi ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	2
52	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Samarinda	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	700
53	Pengelolaan Promosi ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	2
54	Pengembangan Kompetensi ASN	Samarinda	Jumlah ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	ASN	1000
55	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Samarinda	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Dokumen	2
56	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	2
57	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Samarinda	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	10
58	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	2
59	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Samarinda	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	100
60	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen	2

61	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Samarinda	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	200
62	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Samarinda	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	20
63	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	1
64	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Samarinda	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja aparatur	Persentase	100,00
65	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	2
66	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Samarinda	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	700
67	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Samarinda	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	400
68	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	3
69	Pembinaan Disiplin ASN	Samarinda	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	120
70	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1
71	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Samarinda	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	15
72	Evaluasi Disiplin ASN	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	1
73	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Samarinda	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase	15,08
74	Pengembangan Kompetensi Teknis	Samarinda	Jumlah ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	ASN	200
75	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Samarinda	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	1
76	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Samarinda	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	200

77	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen	1
78	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Samarinda	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi , kelembagaan , pengembangan manajerial dan fungsional	ASN	1003
79	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Samarinda	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen	2
80	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	Lembaga	1
81	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	10
82	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	2
83	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	5
84	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	1

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen Rancangan Akhir Renja BKPSDM adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dan bersumber dari dokumen Renstra BKPSDM periode 2025 - 2029, Renstra Kementerian PAN-RB dan Kemendagri serta BKN Pusat yang relevan dan searah menjadi acuan BKPSDM menyusun Renstra dan Renja untuk memperhatikan telaahan terhadap kebijakan nasional.

Kebijakan nasional didalam Asta Cita yang terkait dengan kegiatan BKPSDM

1. Asta Cita 4: Transformasi Sistem Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan

Meskipun Asta Cita 4 tidak secara langsung menyebutkan pengembangan sumber daya aparatur, poin ini memiliki keterkaitan erat. Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan birokrasi yang efisien, inovatif, dan adaptif. Aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten, berintegritas, dan profesional adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.

Aparatur yang profesional akan mampu menyusun kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, mengelola anggaran dengan transparan, dan memberikan pelayanan publik yang cepat dan tepat. Aparatur yang inovatif dapat mendorong sektor-sektor ekonomi baru, sementara aparatur yang adaptif akan siap menghadapi perubahan dan tantangan global.

2. Asta Cita 7: Menegakkan Sistem Hukum yang Berkeadilan dan Berintegritas

Pengembangan sumber daya aparatur merupakan fondasi utama untuk mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan berintegritas.

Peningkatan integritas dan profesionalisme: Pengembangan aparatur menjadi sangat penting untuk memastikan penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan aparatur lainnya) memiliki integritas tinggi dan tidak mudah disuap. Aparatur yang profesional juga akan mampu menerapkan hukum secara konsisten dan adil.

Peningkatan kompetensi: Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan akan memastikan para aparatur penegak hukum memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan perundang-undangan.

Reformasi birokrasi: Penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya bergantung pada penegak hukum, tetapi juga seluruh birokrasi. Pengembangan aparatur dapat mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan hukum dengan lebih mudah.

3. Asta Cita 8: Memantapkan Sistem Demokrasi dan Memperkuat Kualitas Pelayanan Publik

Asta Cita 8 adalah poin yang paling relevan dengan pengembangan sumber daya aparatur. Kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada kualitas aparatur yang menjalankannya.

Pengembangan SDM ASN: Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) secara komprehensif. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi, penguatan integritas, dan pengembangan profesionalisme.

Reformasi Birokrasi: Pengembangan aparatur adalah bagian inti dari reformasi birokrasi. Aparatur yang modern, efisien, dan berintegritas akan mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik.

Penerapan E-government: Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan (e-government) membutuhkan aparatur yang melek teknologi dan siap beradaptasi dengan perubahan.

Peningkatan kesejahteraan aparatur: Kesejahteraan yang layak akan mendorong aparatur untuk bekerja lebih maksimal, berintegritas, dan menghindari praktik korupsi.

Secara umum, ketiga Asta Cita tersebut saling berkaitan dalam upaya membangun Indonesia yang lebih maju. Pengembangan sumber daya aparatur menjadi motor penggerak untuk mencapai semua tujuan tersebut, memastikan bahwa setiap kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan efisien.

Visi dan Misi Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat yang berkaitan dengan kegiatan BKPSDM sebagai berikut :

1. Kementerian PAN-RB

Visi : “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: ‘Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong’.”

Misi :

- a) Menciptakan kelembagaan dan tata kelola birokrasi yang ramping, lincah, terintegrasi, dan berbasis elektronik.
- b) Membangun SDM aparatur yang adaptif, profesional, kompetitif, dan berwawasan global.

2. BKN

Visi : “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya ‘Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi :

- a) Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN.
- b) Penyelenggaraan manajemen ASN.
- c) Penyimpanan informasi pegawai ASN (manajemen data).
- d) Pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam manajemen ASN.
- e) Pengembangan dan optimalisasi sistem manajemen internal BKN.

3. Kementerian Dalam Negeri

Visi : “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan menjaga integritas bangsa “

Misi :

- a) Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengalaman terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
- b) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat – daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
- c) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;

- d) Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
- e) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda mendukung penuh Visi dan Misi Walikota Samarinda , khususnya pada misi ke 5 (lima) yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif , Responsif dan adaktif yang berintegritas dan akuntabel , dengan sasaran Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik . Berdasarkan pada Visi dan Misi Walikota Samarinda Tahun 2025 - 2029, maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda akan melakukan berbagai upaya untuk mendukung pelaksanaan misi tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Walikota Samarinda.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai Rencana Strategis yang ditetapkan yaitu ”Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah” dimana keberhasilan pencapaian tujuan diukur dalam kurun waktu lima tahunan.

Indikator tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu “ Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”, dimana formula/ rumus untuk mengukur Indikator Tujuan tersebut Berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pelaksanaan rencana kerja untuk mendukung tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda adalah :

Sasaran strategis rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2025 - 2029 yaitu “ Terwujudnya ASN yang profesional , berintegritas dan akuntabel ”

Keberhasilan pencapaian Sasaran diukur setiap tahun dengan menggunakan indikator sasaran. Indikator sasaran strategis sekaligus sebagai Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu “ Indeks Profesionalitas ASN “, dimana Formula/ rumus untuk mengukur Indikator Sasaran tersebut adalah Berdasarkan aspek penghitungan IP ASN pada peraturan BKN RI No 8 Tahun 2019 tentang Pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran IP ASN, dengan komponen penilaian berasal dari 4 komponen yaitu 25 Persen dari kualifikasi Pendidikan , 40 persen dari kompetensi, 30 Persen dari kinerja 5 persen dari disiplin.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut dapat disusun strategi di bidang kepegawaian untuk masa mendatang yaitu:

- a. Penguatan *merit system* dalam manajemen kepegawaian.
- b. Meningkatkan kompetensi aparatur.
- c. Meningkatkan mutu dan kualitas layanan kepegawaian berbasis data terintegrasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
- d. Penyederhanaan Struktur Organisasi melalui pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional
- e. Pemetaan kebutuhan norma, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, digitalisasi dokumen acuan, serta evaluasi berkala berbasis indikator implementasi NSPK .

**Penentuan Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Samarinda**

No	Masalah	Tujuan / Sasaran	Rumusan Strategi
1	Masih belum meratanya distribusi pegawai dan penempatan jabatan yang sesuai kompetensi	Terpenuhinya pemerataan distribusi pegawai dan penempatan jabatan yang sesuai kompetensi	Penguatan merit system dalam manajemen kepegawaian.
			Meningkatkan kompetensi aparatur.
			Meningkatkan mutu dan kualitas layanan kepegawaian berbasis data terintegrasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
2			Penyederhanaan Struktur Organisasi melalui pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional
	Kepatuhan terhadap Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Kepegawaian masih kategori sedang	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	Pemetaan kebutuhan norma, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, digitalisasi dokumen acuan, serta evaluasi berkala berbasis indikator implementasi NSPK .

3.3 Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mendukung pencapaian misi kelima Walikota dan Wakil Walikota

Samarinda yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif , Responsif dan adaktif yang berintegritas dan akuntabel.

Dukungan terhadap good and clean governance diwujudkan dalam penyediaan pegawai yang profesional dan berkompeten dalam bentuk ASN yang berkualitas. Kualitas ASN diperoleh dari penguatan manajemen ASN, salah satunya melalui penerapan system merit sesuai UU ASN, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, suku, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, umur dan sebagainya.

“Merit System” sebagaimana dimaksud dalam UU ASN dilakukan melalui:

1. Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif;
2. Menerapkan prinsip fairness;
3. Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja;
4. Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan public;
5. Manajemen SDM secara efektif dan efisien; dan
6. Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena.

Meningkatkan Skor Sistem Merit yang berdasarkan 8 aspek yang terdiri dari :

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai;
2. Pengadaan;
3. Pembinaan Karir dan Peningkatan Kompetensi;
4. Promosi dan Mutasi;
5. Manajemen Kinerja;
6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin;
7. Perlindungan dan Pelayanan;
8. Sistem Informasi.

Selain penerapan sistem merit, dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif , Responsif dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel dibutuhkan peningkatan profesionalitas ASN dan peningkatan pengetahuan , keahlian dan ketrampilan ASN.

SDM pegawai atau SDM aparatur merupakan sesuatu yang dimiliki seorang pegawai yang berkemampuan untuk melakukan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya. Untuk itu, sumber daya aparatur perlu dikelola melalui pemberian pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan , keahlian dan keterampilan SDM aparatur.

Terkait definisi pendidikan dan pelatihan, Hasibuan (2005) mengartikan pendidikan sebagai proses awal berkembangnya manusia, sedangkan pelatihan merupakan kelanjutan atau pembenahan kecakapan, ketangkasan serta kemampuan guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dalam Permendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan Inmen No 2 Tahun 2025 serta hasil pencermatan antara BKPSDM dan Bapperida pada tahun 2025. Untuk tahun 2026 , Rencana kerja program sebanyak 3 (tiga program) , kegiatan sebanyak 14 (empat belas) dan sub kegiatan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) , ditampilkan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.1

**TABEL RENCANA PROGRAM , KEGIATAN , SUB KEGIATAN
DAN TARGET KINERJA TAHUN 2026**

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
7	9	10
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100
Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3
Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Presentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10

Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2
Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	200
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1
Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	2
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	95%
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	95%
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2

Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	3
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	120
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15
Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	90
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	100
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	104
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1
Meningkatnya layanan pengembangankompetensi dasar , kader , manajerial dan fungsional	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100

Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2
Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	1
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10
Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1

Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	1
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi dan Sumber Belajar	1

Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber aya Manusia Kota Samarinda tahun 2026 sesuai hasil analisa program dan kebutuhan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 78.417.325.277 (Tujuh puluh delapan milyar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Tabel T.C 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

No	KODE	JUDUL/ SUBANGGARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAMBAH AKHIR PERIODIK KEMENTERIAN / OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA RENCANA OPD TAHUN 2022	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2022	KETERANGAN INDIKATOR DAN KETERANGAN PENCAPAIAN				KELIMPAHAN (KAWASAN)	PENGALAMAN / KAWASAN / KEGIATAN / KEGIATAN	PERANGKAT KENDALI / PERANGKAT KENDALI			
							TAMBAH AKHIR PERIODIK KEMENTERIAN / OPD	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET RENCANA RENCANA OPD TAHUN 2022	LOKASI	SARANA / ALAT				INDIKATOR		
														INDIKATOR	INDIKATOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15.911.125.371.00								15.911.125.371.00	
		SARAN KEMERDEKAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUMBERIDA					15									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		1. Menetapkan kegiatan proyek	Persepsi dan ASN yang terdampak	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	6.378.000.000,00						8.961.000.000,00	
134.02.2.01.0001	Pengembangan dan penguatan	Persepsi dan ASN yang terdampak						6.378.000.000,00			Persepsi dan penguatan ASN yang terdampak	1. Menetapkan	ASN di Lingkungan Pesisir	7.960.000.000,00	BUNDA KOTA SAMARINDA
134.02.2.01.0002	Pengembangan dan penguatan	Persepsi dan ASN yang terdampak						6.378.000.000,00			Persepsi dan penguatan ASN yang terdampak	1. Menetapkan	ASN di Lingkungan Pesisir	7.960.000.000,00	BUNDA KOTA SAMARINDA
134.02.2.01.0003	Pengembangan dan penguatan	Persepsi dan ASN yang terdampak						6.378.000.000,00			Persepsi dan penguatan ASN yang terdampak	1. Menetapkan	ASN di Lingkungan Pesisir	7.960.000.000,00	BUNDA KOTA SAMARINDA
134.02.2.01.0004	Pengembangan dan penguatan	Persepsi dan ASN yang terdampak						6.378.000.000,00			Persepsi dan penguatan ASN yang terdampak	1. Menetapkan	ASN di Lingkungan Pesisir	7.960.000.000,00	BUNDA KOTA SAMARINDA
134.02.2.01.0005	Pengembangan dan penguatan	Persepsi dan ASN yang terdampak						6.378.000.000,00			Persepsi dan penguatan ASN yang terdampak	1. Menetapkan	ASN di Lingkungan Pesisir	7.960.000.000,00	BUNDA KOTA SAMARINDA
134.02.2.01.0006	Pengembangan dan penguatan	Persepsi dan ASN yang terdampak						6.378.000.000,00			Persepsi dan penguatan ASN yang terdampak	1. Menetapkan	ASN di Lingkungan Pesisir	7.960.000.000,00	BUNDA KOTA SAMARINDA
134.02.2.01.0007	Pengembangan dan penguatan	Persepsi dan ASN yang terdampak						6.378.000.000,00			Persepsi dan penguatan ASN yang terdampak	1. Menetapkan	ASN di Lingkungan Pesisir	7.960.000.000,00	BUNDA KOTA SAMARINDA
134.02.2.01.0008	Pengembangan dan penguatan	Persepsi dan ASN yang terdampak						6.378.000.000,00			Persepsi dan penguatan ASN yang terdampak	1. Menetapkan	ASN di Lingkungan Pesisir	7.960.000.000,00	BUNDA KOTA SAMARINDA
134.02.2.01.0009	Pengembangan dan penguatan	Persepsi dan ASN yang terdampak						6.378.000.000,00			Persepsi dan penguatan ASN yang terdampak	1. Menetapkan	ASN di Lingkungan Pesisir	7.960.000.000,00	BUNDA KOTA SAMARINDA
134.02.2.01.0010	Pengembangan dan penguatan	Persepsi dan ASN yang terdampak						6.378.000.000,00			Persepsi dan penguatan ASN yang terdampak	1. Menetapkan	ASN di Lingkungan Pesisir	7.960.000.000,00	BUNDA KOTA SAMARINDA

[illegible]

[illegible]

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Akhir Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, hasil evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024, dan hasil evaluasi hasil Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting

untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan perubahan rancangan akhir rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

No	Kode	URAIAN / BANGUNAN / LURAH / PROGRAM / DUTY/CM / KICATAN / SUB KICATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANGKUT PERKOTA (KOTA/OPD)	REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2024	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KEBERANGKIPAN PEMERINTAH					KELUARGA SAKITAN	PENCAPAIAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PENCAPAIAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
							TARGET 2024	PACU INDIKATOR (%)	LOKASI	SUMBER DATA	PROJEKSI					
											MAKIN	MAKIN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		BADAN KEPERAWATAN DAN PENCERAMBAAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA							76.071.335.277,00				76.071.335.277,00			
6		URAIAN PERANGKIPAN						76.071.335.277,00					76.071.335.277,00			
6.01		URAIAN PENCERAMBAAN						76.071.335.277,00					76.071.335.277,00			
6.01.01		URAIAN PENCERAMBAAN						76.071.335.277,00					76.071.335.277,00			
6.01.01.01		URAIAN PENCERAMBAAN						76.071.335.277,00					76.071.335.277,00			
6.01.01.01.01		URAIAN PENCERAMBAAN						76.071.335.277,00					76.071.335.277,00			
6.01.01.01.01.01		URAIAN PENCERAMBAAN						76.071.335.277,00					76.071.335.277,00			
6.01.01.01.01.01.01		URAIAN PENCERAMBAAN						76.071.335.277,00					76.071.335.277,00			
6.01.01.01.01.01.01.01		URAIAN PENCERAMBAAN						76.071.335.277,00					76.071.335.277,00			
6.01.01.01.01.01.01.01.01		URAIAN PENCERAMBAAN						76.071.335.277,00					76.071.335.277,00			
6.01.01.01.01.01.01.01.01.01		URAIAN PENCERAMBAAN						76.071.335.277,00					76.071.335.277,00			
6.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		URAIAN PENCERAMBAAN						76.071.335.277,00					76.071.335.277,00			
6.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		URAIAN PENCERAMBAAN						76.071.335.277,00					76.071.335.277,00			
6.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		URAIAN PENCERAMBAAN						76.071.335.277,00					76.071.335.277,00			
6.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		URAIAN PENCERAMBAAN						76.071.335.277,00					76.071.335.277,00			
6.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		URAIAN PENCERAMBAAN						76.071.335.277,00					76.071.335.277,00			
6.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		URAIAN PENCERAMBAAN						76.071.335.277,00					76.071.335.277,00			
6.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		URAIAN PENCERAMBAAN						76.071.335.277,00					76.071.335.277,00			
6.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		URAIAN PENCERAMBAAN						76.071.335.277,00					76.071.335.277,00			
6.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		URAIAN PENCERAMBAAN						76.071.335.277,00					76.071.335.277,00			
6.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		URAIAN PENCERAMBAAN						76.071.335.277,00					76.071.335.277,00			
6.01		URAIAN PENCERAMBAAN						76.071.335.277,00					76.071.335.277,00			
6.01		URAIAN PENCERAMBAAN						76.071.335.27								

									Rampasan Bersus KadZewa	(PAZ)	Surat Pukun dan Dakwat, serta memo arahan per- hubungan dan perhubungan dan surat, menerima, putr, dan ya menerima	Disusun induk dan berkawat dan D. Menerima dan nota akutia per- hubungan menerima, menerima, dan akutia yang menerima dan akutia				BUMBU DAWA MANUSA KOTA SAMARINDA
1.01.01.1.01.001	Pencapaian Administrasi Pendidikan Ygno ARI															
		Jumlah Dokumen: Akut Persepsi				12 Dokumen	1.001.002.270.00	Rupa Samandak Bersus Kawamari, Bersus KadZewa	PENGAWATAN ASU DAKERA (PAZ)	Surat Pukun dan Dakwat, serta memo arahan per- hubungan dan perhubungan dan surat, menerima, putr, dan ya menerima	Disusun induk dan berkawat dan D. Menerima dan nota akutia per- hubungan menerima, menerima, dan akutia yang menerima dan akutia			1.001.002.270.00	SAMAM KEPULAWAN DAN PENGEMBANGAN BUMBU DAWA MANUSA KOTA SAMARINDA	
		-	-	-	-	-	11.004.005.000.00								11.004.005.000.00	
1.01.01.1.01.001	Kawamari dan Persepsi Laporan Keuangan BIRU Tahun 2004															
		Jumlah Laporan Keuangan Akut				12 Laporan	11.004.005.000.00	Rupa Samandak Bersus Kawamari, Bersus KadZewa	PENGAWATAN ASU DAKERA (PAZ)	Surat Pukun dan Dakwat, serta memo arahan per- hubungan dan perhubungan dan surat, menerima, putr, dan ya menerima	Disusun induk dan berkawat dan D. Menerima dan nota akutia per- hubungan menerima, menerima, dan akutia yang menerima dan akutia			11.004.005.000.00	SAMAM KEPULAWAN DAN PENGEMBANGAN BUMBU DAWA MANUSA KOTA SAMARINDA	
1.01.01.1.01.001	Administrasi Keuangan: Persepsi BIRU	Penerbitan laporan administrasi keuangan yang diketahui dan diketahui dan diketahui				12 Laporan	11.004.005.000.00			Surat Pukun dan Dakwat, serta memo arahan per- hubungan dan perhubungan dan surat, menerima, putr, dan ya menerima	Disusun induk dan berkawat dan D. Menerima dan nota akutia per- hubungan menerima, menerima, dan akutia yang menerima dan akutia			11.004.005.000.00	SAMAM KEPULAWAN DAN PENGEMBANGAN BUMBU DAWA MANUSA KOTA SAMARINDA	

[illegible]

		SA/PI						Berupa Kertas		Indikator dan Berkas yang dikumpulkan untuk mendukung kegiatan dan pembelajaran yang terjadi dalam proses belajar mengajar							KOTA SAMARINDA
1.03.01.2.37	Pengadaan Barang ROK, Dampak	Tingkat pertumbuhan Barang MIA Dampak Pengaruh								Indikator dan Berkas yang dikumpulkan untuk mendukung kegiatan dan pembelajaran yang terjadi dalam proses belajar mengajar							SARAH KEPOLAKSIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
1.03.01.2.37.0001	Pengadaan Kendaraan Persewaan Gelas atau Kendaraan Gelas Jabatan									Indikator dan Berkas yang dikumpulkan untuk mendukung kegiatan dan pembelajaran yang terjadi dalam proses belajar mengajar							SARAH KEPOLAKSIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
1.03.01.2.37.0002	Pengadaan Kendaraan Persewaan Gelas atau Kendaraan Gelas Jabatan									Indikator dan Berkas yang dikumpulkan untuk mendukung kegiatan dan pembelajaran yang terjadi dalam proses belajar mengajar							SARAH KEPOLAKSIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
1.03.01.2.37.0003	Pengadaan Kendaraan Persewaan Gelas atau Kendaraan Gelas Jabatan									Indikator dan Berkas yang dikumpulkan untuk mendukung kegiatan dan pembelajaran yang terjadi dalam proses belajar mengajar							SARAH KEPOLAKSIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
1.03.01.2.37.0004	Pengadaan Kendaraan Persewaan Gelas atau Kendaraan Gelas Jabatan									Indikator dan Berkas yang dikumpulkan untuk mendukung kegiatan dan pembelajaran yang terjadi dalam proses belajar mengajar							SARAH KEPOLAKSIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
1.03.01.2.37.0005	Pengadaan Kendaraan Persewaan Gelas atau Kendaraan Gelas Jabatan									Indikator dan Berkas yang dikumpulkan untuk mendukung kegiatan dan pembelajaran yang terjadi dalam proses belajar mengajar							SARAH KEPOLAKSIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
1.03.01.2.37.0006	Pengadaan Kendaraan Persewaan Gelas atau Kendaraan Gelas Jabatan									Indikator dan Berkas yang dikumpulkan untuk mendukung kegiatan dan pembelajaran yang terjadi dalam proses belajar mengajar							SARAH KEPOLAKSIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
1.03.01.2.37.0007	Pengadaan Kendaraan Persewaan Gelas atau Kendaraan Gelas Jabatan									Indikator dan Berkas yang dikumpulkan untuk mendukung kegiatan dan pembelajaran yang terjadi dalam proses belajar mengajar							SARAH KEPOLAKSIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0.00.02.1.01.001	Pengadaan Gula Segipawalan	Jumlah Dokumen Awal Pengadaan				1 Dokumen	100.000.000,00	Rupa Samudra Bumia Kacandian Bumia Kaldese	PENGAWATAN ABU DAKSIA (PAK)	Menyempurnakan informasi publik, hukum dan kebijakan, serta memonitor pelaksanaan dan pencapaian hasil program, termasuk melalui survei, studi, dan penyaluran	1. Menentukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaksanaan		100.000.000,00	SALAH KEPETAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	1. Menentukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaksanaan	Persentase pengembalian ke ARI sesuai dengan targetnya	100,00%	100%	100,00%	100,00%	7.047.300.000,00						7.047.300.000,00	
0.00.02.3.02	Musim dan Pemasangan	Persentase pengembalian ke ARI sesuai dengan targetnya				100%	1.000.000.000,00			Menyempurnakan informasi publik, hukum dan kebijakan, serta memonitor pelaksanaan dan pencapaian hasil program, termasuk melalui survei, studi, dan penyaluran	1. Menentukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaksanaan	ARI di Lingkungan Pemas	1.000.000.000,00	SALAH KEPETAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
0.00.02.1.01.002	Pengadaan Mutasi ARI	Jumlah Dokumen Awal Pengadaan				1 Dokumen	200.000.000,00	Rupa Samudra Bumia Kacandian Bumia Kaldese	PENGAWATAN ABU DAKSIA (PAK)	Menyempurnakan informasi publik, hukum dan kebijakan, serta memonitor pelaksanaan dan pencapaian hasil program, termasuk melalui survei, studi, dan penyaluran	1. Menentukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaksanaan	ARI di Lingkungan Pemas	200.000.000,00	SALAH KEPETAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
0.00.02.3.02.002	Pengadaan Koreksi Pengaliran	Jumlah Dokumen Awal Pengadaan				1 Dokumen	500.000.000,00	Rupa Samudra Bumia Kacandian Bumia Kaldese	PENGAWATAN ABU DAKSIA (PAK)	Menyempurnakan informasi publik, hukum dan kebijakan, serta memonitor pelaksanaan dan pencapaian hasil program, termasuk melalui survei, studi, dan penyaluran	1. Menentukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaksanaan	ARI di Lingkungan Pemas	500.000.000,00	SALAH KEPETAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

[illegible]

		Anggar SDP berskala Bulat															
010102.1.34	Perbaikan dan Ekstensi Koneksi Aspal	Perbaikan jaringan aspal SDP berskala bulat				10%	1.125.000.000,00				Menyempurnakan informasi publik, layanan dan pelayanan, serta meningkatkan pelayanan dan pemantauan dan pengawasan, serta, dan sebagainya	1. Meningkatkan kemampuan publik, layanan dan pelayanan, serta meningkatkan pelayanan dan pemantauan dan pengawasan, serta, dan sebagainya	ASPI di Lingkungan Perairan		1.750.000.000,00		SALAH KEPELUAHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
010102.1.34.0002																	
Pengamanan Perbaikan dan Ekstensi Koneksi Aspal																	
		Jumlah Dukumen (Kad) Pemasangan				1 Dukumen	900.000.000,00	Kota Samarinda Bumih Kacamatan, Bumih Kacamatan	PENGAPALAN ASPI (DAERHA PMA)	Menyempurnakan informasi publik, layanan dan pelayanan, serta meningkatkan pelayanan dan pemantauan dan pengawasan, serta, dan sebagainya	1. Meningkatkan kemampuan publik, layanan dan pelayanan, serta meningkatkan pelayanan dan pemantauan dan pengawasan, serta, dan sebagainya	ASPI di Lingkungan Perairan		450.000.000,00		SALAH KEPELUAHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
010102.1.34.0004																	
Pengamanan Perbaikan dan Ekstensi Koneksi Aspal																	
		Jumlah ASPI yang Diberikan Pengamanan				100 Orang	900.000.000,00	Kota Samarinda Bumih Kacamatan, Bumih Kacamatan	PENGAPALAN ASPI (DAERHA PMA)	Menyempurnakan informasi publik, layanan dan pelayanan, serta meningkatkan pelayanan dan pemantauan dan pengawasan, serta, dan sebagainya	1. Meningkatkan kemampuan publik, layanan dan pelayanan, serta meningkatkan pelayanan dan pemantauan dan pengawasan, serta, dan sebagainya	ASPI di Lingkungan Perairan		900.000.000,00		SALAH KEPELUAHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
010102.1.34.0006																	
Pengamanan Perbaikan dan Ekstensi Koneksi Aspal																	
		Jumlah ASPI yang Diberikan Perbaikan dan Ekstensi Koneksi Aspal				100 Orang	900.000.000,00	Kota Samarinda Bumih Kacamatan, Bumih Kacamatan	PENGAPALAN ASPI (DAERHA PMA)	Menyempurnakan informasi publik, layanan dan pelayanan, serta meningkatkan pelayanan dan pemantauan dan pengawasan, serta, dan sebagainya	1. Meningkatkan kemampuan publik, layanan dan pelayanan, serta meningkatkan pelayanan dan pemantauan dan pengawasan, serta, dan sebagainya	ASPI di Lingkungan Perairan		150.000.000,00		SALAH KEPELUAHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	

[illegible]

		3. Meningkatkan layanan program	Personalia ASN yang terakreditasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	6.375.000.000,00							6.401.000.000,00	
0.56.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Personalia ASN yang terakreditasi					100%	2.500.000.000,00			Menyempurnakan informasi publik, termasuk dan terakreditasi, serta meningkatkan persinggahan dan pemerintahan secara terpadu, terakreditasi, dan terakreditasi yang terakreditasi	1. Meningkatkan persinggahan dan terakreditasi	ASN di Lingkungan Pemerintah		2.500.000.000,00	SALAH KEPELAWAKHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMBONG
0.56.02.2.01.0001	Pengawasan Kebijakan Teknis dan Personalia Pengembangan Kompetensi Teknis Utama, dan Pribadi bagi Jabatan Administrasi Pengembangan Utama Pemerintahan Kabupaten Pengawal Daerah Pemangku dan Utama Pemerintahan Utama															
		Jumlah Kelembagaan Teknis dan Pribadi					1 Dokumen	100.000.000,00	Asli Berakreditasi Sensus Kecamatan Sensus Kabupaten	PENGAWATAN ASLI DANERIA (PME)	Menyempurnakan informasi publik, termasuk dan terakreditasi, serta meningkatkan persinggahan dan pemerintahan secara terpadu, terakreditasi, dan terakreditasi yang terakreditasi	1. Meningkatkan persinggahan dan terakreditasi	ASN di Lingkungan Pemerintah		100.000.000,00	SALAH KEPELAWAKHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMBONG
0.56.02.2.01.0002	Pengembangan Pengembangan Kompetensi Teknis Utama, dan Pribadi bagi Jabatan Administrasi Pengembangan Utama Pemerintahan Kabupaten Pengawal Daerah Pemangku dan Utama Pemerintahan Utama															
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi					100 Orang	1.000.000.000,00	Asli Berakreditasi Sensus Kecamatan Sensus Kabupaten	PENGAWATAN ASLI DANERIA (PME)	Menyempurnakan informasi publik, termasuk dan terakreditasi, serta meningkatkan persinggahan dan pemerintahan secara terpadu, terakreditasi, dan terakreditasi yang terakreditasi	1. Meningkatkan persinggahan dan terakreditasi	ASN di Lingkungan Pemerintah		1.000.000.000,00	SALAH KEPELAWAKHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMBONG
0.56.02.2.01.0003	Peningkatan Pengembangan, Fasilitas, Peningkatan, Evaluasi dan Peningkatan Pengembangan Kabupaten Utama, dan Pribadi bagi Jabatan Administrasi Pengembangan Utama Pemerintahan Kabupaten Pengawal Daerah Pemangku dan Utama Pemerintahan Utama															
		Jumlah Dokumen dan Peningkatan Pengembangan Fasilitas, Peningkatan, Evaluasi dan Peningkatan Pengembangan Kabupaten Utama, dan Pribadi bagi Jabatan Administrasi Pengembangan Utama Pemerintahan Kabupaten Pengawal Daerah Pemangku dan Utama Pemerintahan Utama					1 Dokumen	100.000.000,00	Asli Berakreditasi Sensus Kecamatan Sensus Kabupaten	PENGAWATAN ASLI DANERIA (PME)	Menyempurnakan informasi publik, termasuk dan terakreditasi, serta meningkatkan persinggahan dan pemerintahan secara terpadu, terakreditasi, dan terakreditasi yang terakreditasi	1. Meningkatkan persinggahan dan terakreditasi	ASN di Lingkungan Pemerintah		100.000.000,00	SALAH KEPELAWAKHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMBONG

[illegible]

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda Tahun 2026 sebagai acuan dalam pembangunan sektor Kepegawaian di Kota Samarinda yang didasari pada prinsip-prinsip “*good governance*”.

Terwujudnya “*good governance*” sangat dibutuhkan sehingga mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam rangka reformasi birokrasi di bidang kepegawaian.

Untuk mencapai kebijakan tersebut diperlukan adanya peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang dirumuskan secara sistematis dalam bentuk rincian kegiatan setiap tahunnya.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.